

MAKRO

IAGI Apresiasi PLN Segera Atasi Pemadaman

NERACA

Jakarta - Ketua Kebijakan Publik Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Singgih Widagdo memberikan apresiasi atas gerak cepat yang dilakukan PLN, untuk mengatasi kejadian pemadaman total (blackout) listrik di Jabodetabek, Banten, dan sebagian wilayah Jawa Tengah yang terjadi Minggu (4/8) lalu dan pemadaman masih berlangsung sebagian kecil di beberapa daerah sampai hari Senin (5/8).

Terjadi pemadaman pada Minggu (4/8), ia berharap masyarakat bisa memahami kejadian tersebut sebagai kecelakaan dalam masalah teknis transmisi, dan kondisi serupa juga pernah terjadi di berbagai negara. "Memang tidak semua bisa langsung hidup karena terkait dengan sistem, termasuk yang aliran listriknya dari PLTU. Saya tidak sependapat kalau hal ini dikaitkan dengan ketidakkompetenan PLN tanpa memahami kronologisnya dengan jelas. Yang saya lihat, PLN sudah terlihat melakukan gerak cepat untuk mengatasi keadaan," ujar Singgih.

Kecelakaan tersebut, menurut Singgih, merupakan masalah teknis transmisi yang terjadi di Ungaran, Semarang. Ada gangguan aliran power dari Timur yang tidak bisa masuk ke Barat, sementara cadangan (reserve) di Barat tidak tinggi. Oleh karena itu, menurutnya, pembelajaran pertama dari kejadian ini adalah perlunya perbaikan sistem secara keseluruhan, dari hulu sampai hilir (dari pembangkit sampai ke pelanggan), baik dari sisi aksesibilitas maupun kapabilitas cadangan listrik.

Simpati lain ia tunjukkan dari sikap PLN yang menanggung sebagian besar beban (moral maupun material) dengan lapang dada. "Recovery untuk perbaikan sistem teknis memang ada di PLN. Tapi idealnya, dari sisi sistem manajemen krisis, regulator juga bicara agar tidak semua terbeban kepada PLN saja," tambahnya.

Terjadi Di Negara Maju

Senada dengan Singgih, Ketua CIGRE (Conseil International des Grands Reseaux Electriques = Dewan Internasional Sistem Listrik Besar) Indonesia Herman Damel Ibrahim memaparkan, bahwa kejadian blackout atau gangguan besar seperti ini, sebenarnya juga pernah terjadi di mana-mana termasuk di negara maju. Negara maju seperti USA juga beberapa kali mengalami blackout. Di New York tercatat tiga kejadian yaitu pada 13 Juli 1977, 14 Agt 2003 dan terakhir baru saja bulan lalu 14 Juli 2019. "Jadi rata-rata periodenya 15-20 tahunan," ujarnya lagi.

Pemulihan blackout New York pada tahun 2003, menurutnya, memerlukan waktu lebih 2 hari. Sementara kejadian terbaru pada 13 Juli 2019 lalu, juga baru pulih setelah 2 hari. "California juga pernah mengalami blackout tahun 1996, 2011, 2018 dan 2019. Bahkan dalam kejadian blackout pada 2011 di negara itu, Gubernurnya sampai mengatakan, 'Even new cars can get breakdown'."

Begitu lazimnya kejadian ini, sehingga dalam konferensi CIGRE [Dewan Internasional Sistem Listrik Besar/Conseil International des Grands Reseaux Electriques] yang diselenggarakan tiap tahun genap, di Paris, jelas Herman, selalu ada Sesi Plenary khusus yang mempresentasikan kejadian Blackout /Large Disturbances yang terjadi di suatu negara.

Dalam sistem interkoneksi Jawa Bali, Herman yang pernah menjabat sebagai Direktur Transmisi dan Distribusi PLN periode 2003 - 2008 ini, mencatat setidaknya pernah terjadi 4 kali blackout. Masing-masing pada tanggal 13 April 1997, 18 Agt 2005, 18 Maret 2009 dan terakhir 4 Agt 2019 kemarin. "Jadi kira-kira 'periode'nya sekali dalam 5-10 tahunan," ujarnya.

Interkoneksi Jawa Bali memang membuat sistem menjadi kuat, namun dalam sistem buatan manusia tidak ada jaminan reliabilitas yang 100%. Mengutip perkataan Murpgis Law, Herman mengatakan un-reliability yang walau hanya 0.0000 sekian persen bisa menjadi penyebab. Herman memaparkan, gangguan blackout umumnya diawali oleh gangguan dari luar, hubungan ke tanah atau lainnya.

Gangguan juga bisa terkait dengan kelemahan dalam komponen sistem seperti kekurangan infrastruktur (N-1), asupan terkait setting proteksi, kontrol dan lain-lain. Dalam kondisi itu, jika proteksi tak bekerja sempurna, gangguan potensial untuk meluas. Kriteria sekuriti sistem PLN seperti dimuat dlm RUPITL adalah N-1, artinya sistem didisain untuk tetap aman jika 1 komponen sistem trip [tanpa load curtailment].

Dalam sistem Jawa Bali, menurutnya, tidak semua N-1 terpenuhi, khususnya pada transmisi. Komposisi pembangkit dan beban bisa bervariasi, bisa ada saat-saat dimana kriteria N-1 tersebut tak terpenuhi. Sistem Jawa Bali adalah interkoneksi yang sangat besar dengan sekitar 500 gardu Induk dan 200-an unit pembangkit serta ribuan km transmisi. Melalui sistem interkoneksi itu, sejatinya sistem menjadi sangat kuat sehingga jarang sekali terjadi gangguan pasokan. ●hari



NERACA/Widi Suparwadi

MENILIK KESIAPAN PENERAPAN AIS : Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R Agus H Purnomo (kanan) berbincang dengan (dari kiri ke kanan), Manager Komunikasi Kelembagaan dan CSR PT Pelni (Persero) Akhmad Sujadi, Direktur Perkapalan dan Kapal Laut Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Capt Sugiyono, Sekretaris Umum Indonesian National Shipowner Association (INSA) Budhi Halim dan Pengamat Soleman B Ponto disela acara diskusi Forum Wartawan Perhubungan bertema Menilik Kesiapan Penerapan AIS (Automatic Identification System) di Jakarta, Selasa (6/8).

Pemindahan Ibukota, Indonesia Belajar dari Negara Lain

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengarahkan beberapa pihak terkait pemindahan ibu kota pemerintahan untuk mempelajari hal itu dari sejumlah negara yang telah melakukannya. "Saya juga minta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari, faktor-faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin," kata Presiden dalam sambutan pembukaan rapat terbatas bertopik Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa (6/8).

■ NERACA

Menurut Presiden, pemerintah juga dapat mengambil kunci keberhasilan negaralain dalam pemindahan ibu kota sehingga dapat diadaptasi oleh Indonesia. Jokowi pun mengingatkan untuk mempersiapkan skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN. "Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya dan juga yang paling penting payung hukum regulasi mengenai peminda-

han ibukota ini," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dalam rapat pada Senin (29/4) menjelaskan pembangunan ibu kota baru diharapkan tidak terlalu membebani APBN dengan melibatkan swasta dan BUMN. Hasil kajian yang disebutkan Bambang menilai total investasi yang dibutuhkan sekira Rp480 triliun.

Dia juga menyebut beberapa negara yang telah

memindahkan ibu kota pemerintahannya antara lain Amerika Serikat di Washington DC, Brazil di Brasilia, Australia di Canberra, Malaysia di Putra Jaya, dan Korea Selatan di Sejong. Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pembangunan ibukota yang baeu akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2021-2024, lalu 2025-2029, dan 2030-2045.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan sebuah petunjuk dalam memperjelas lokasi pasti ibu kota baru yaitu letaknya berada di dekat kawasan pertambangan. Hal tersebut tidak sengaia dikatakan olehnya ketika menghadiri acara Dialog Nasional ke-3 terkait Pemindahan Ibu kota Negara yang berlangsung di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, pekan kemarin. "Lokasinya kira-kira, ohnantikoksayamalah ngomong," kata Basuki.

Ia mengatakan hal itu ketika sedang menjelaskan bahwa dalam merancang ibu kota ia akan memperhatikan wilayah kerja tambang karena lokasinya sangat berdekatan. Basuki menjelaskan, pemerintah sedang melakukan peninjauan sumber air di daerah ibukota yang baru untuk mengantisipasi ketersediaan air bagi masyarakat yang akan tinggal di sana. "Yang perlu diperhatikan adalah rencana kualitas airnya, karena di sana banyak tambang-tambang," ujarnya.

Seperti yang diketahui bahwa sampai saat ini Presiden Joko Widodo maupun Basuki dan pemerintah lain masih enggan membocorkan lokasi ibu kota baru kepada publik, meskipun banyak isu yang menyebutkan bahwa Pulau Kalimantan menjadi tujuan utamanya. "Belum, belum. Belum, nanti diumumkan presiden ya," katanya. Menurut, hingga kini pemerintah masih dalam tahap baru pengkajian. ●hari

Pemerintah Diminta kaji Ulang Strategi Ketahanan Energi

NERACA

Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan pemerintah perlu mengkaji ulang strategi ketahanan energi nasional. Hal ini disampaikan BPKN terkait kejadian pemadaman listrik yang melanda wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah.

"Kejadian pemadaman listrik harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah

dan pelaku usaha, khususnya PLN dan juga masyarakat. Pemerintah perlu mengkaji ulang strategi ketahanan energi nasional kitayangtampaknya masih rapuh," kata Ketua BPKN, Ardiansyah Parman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/8).

Ia mengingatkan bahwa energi listrik adalah kebutuhan dasar yang menunjang perekonomian nasional, sedangkan kegagalan sistem kelistrikan nasional pada Ahad (4/8) yang menimpa kawasan dengan sekitar 40 persen populasi nasional dinilai mengakibatkan kerugian kepada konsumen

dalam skala besar dan luas. Selain itu, ujar dia, pemadaman tersebut juga berimbas buruk kepada berbagai sektor pelayanan strategis seperti transportasi publik, telekomunikasi, sistem pembayaran dan jasa keuangan. "PLN selain harus mengevaluasi dan memperbaiki kembali manajemen risiko dan sistem kedaruratan, juga harus memulihkan kerugian yang menimpakan jutaan konsumen, termasuk pelaku usaha," kata Ardiansyah.

Ketua BPKN juga menginginkan agar pemerintah mengevaluasi kembali sistem kelistrikan nasional

yang bersifat monopoli dengan memberikan insentif kepada sistem jaringan listrik independen untuk mengurangi beban negara dan mendorong investasi infrastruktur kelistrikan swasta, terutama dengan sumber daya terbarukan.

Saat ini, hambatan kepada produsen listrik independen dinilai sangat tinggi sehingga juga menyulitkan investor, padahal itu bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban pemerintah. "Demikian juga banyaknya keluhan sulitnya produsen masuk ke sistem jaringan PLN walau dari energi terbarukan," katanya. ●hari

Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Buruh Bakal Temui Presiden

NERACA

Jakarta - Setelah kalangan dunia usaha yang mendatangi Presiden Joko Widodo di Istana Bogor awal Juli lalu, kini para tenaga kerja atau buruh akan meminta untuk bertemu dengan Presiden untuk membahas soal UU Ketenagakerjaan. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pihaknya sudah mengirim surat kepada Presiden untuk membahas soal revisi UU ketenagakerjaan.

KSPI menilai revisi UU Ketenagakerjaan dapat menurunkan perlindungan terhadap para tenaga kerja. "Kami sudah menyampaikan surat untuk segera bertemu Presiden Jokowi mengenai revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Mungkin pertemuan akan terlaksana seminggu atau dua minggu yang akan datang," kata Said Iqbal di Jakarta, Selasa (6/8).

Dia mengatakan para buruh menolak revisi UU 13/2003 yang diusulkan oleh para pengusaha seperti Kadin, Apindo dan lainnya. Mereka menilai, pesangon bagi pekerja yang terlalu besar menyebabkan investor sulit datang ke Indonesia. Said Iqbal mengatakan jika ingin merevisi sebaiknya undang-undang yang berkaitan dengan investasi seperti Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perindustrian dan Undang-Undang Penanaman Modal.

UU Ketenagakerjaan harusnya dibuat untuk melindungi dan menyejahterakan para pekerja, bukan menjadi undang-undang yang mengeksploitasi para pekerja. KSPI berharap dengan pertemuan itu Presiden Joko Widodo dapat mempertimbangkan kembali revisi undang-undang tersebut. Jika suara-suara mereka tidak didengar, para buruh akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak revisi UU Ketenagakerjaan. "Aksi dilakukan di 20 provinsi di Indonesia secara serentak kemudian aksi juga akan kami lakukan di depan Istana Merdeka dan Gedung DPR," kata dia.

Disisi lain, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan aturan ketenagakerjaan di Indonesia masih terlalu kaku atau kurang fleksibel. Oleh karena itu, biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh setiap pelaku usaha pun besar. "Kalau aturan terlalu rigid, biaya perusahaan jadi tinggi. Kalau biaya tinggi biasanya penyerapan tenaga kerja (di sektor formal) menjadi rendah. Harapan kami dibuat lebih netral agar penyerapan lebih besar," ucap Hariyadi.

Hariyadi menyebut pelaku usaha formal enggan membuka lapangan kerja lebih besar jika regulasi keduanya masih dirasa kurang fleksibel. Padahal, Hariyadi meyakini pekerja formal adalah pihak yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih kencang dari posisi saat ini. Pasalnya, pekerja formal akan mendapatkan gaji yang sesuai upah minimum dan sejumlah fasilitas resmi dari kantor, seperti asuransi.

"Kalau revisi informal itu kan out of system. Seharusnya banyak pekerja di sektor formal membuat kualitas pendapatan domestik bruto (PDB) lebih baik, kalau sekarang masih didorong oleh sektor dan kelas tertentu saja. Tidak merata," papar Hariyadi.

Jika revisi UU Ketenagakerjaan masih tarik ulur seperti ini, Hariyadi memprediksi pertumbuhan ekonomi ke depannya tak jauh dari 5 persen atau dengan kata lain Indonesia masih terjebak sebagai negara dengan pendapatan menengah. "Tapi masih mending di pendapatan menengah, saya khawatir menjadi low income. Itu lebih jelek lagi," katanya.

Disisi lain, Praktisi hukum ketenagakerjaan dari Dentons HPRP, Linna Simamora, menjelaskan isu ketenagakerjaan juga perlu memperhatikan daya saing investasi asing, bukan hanya kepentingan buruh dan pengusaha. Ia menilai, ada beberapa hal yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan belum fleksibel bagi para investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia. "Isu mengenai proses permutusan hubungan kerja (PHK) yang menyaratkan pemberian surat peringatan satu, dua dan tiga sebelum dilakukan PHK dirasa kurang fleksibel dan berbelit-belit," ujar dia dalam pernyataan tertulis. ●hari

Tak Bisa Atasi Karhutla, Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres Bakal Dicopt

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur, Pangdam, Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu dari Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kepala BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). "Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

Presiden mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu. "Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopt yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopt atau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Pemda, Gubernur, Bupati, Walikota agar di backup (upaya ini, red) karena kerugian ekonomi besar sekali. "Jadi Pak Panglima Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan, karena saya engga bisa nyopot Gubernur, engga bisa nyopot Bupati atau Walikota, jangan sampai adayang namanya status siaga darurat, jangan sampai, ada api sekecil apapun segera diselesaikan sudah," sambung Presiden. Ia mengingatkan, masing-masing punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah. ●hari

PENGUMUMAN HASIL AKHIR

PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT. TELLABS INDONESIA (DALAM LIKUIDASI)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Likuidator **P. Tellabs Indonesia** (dalam likuidasi) ("Perseroan") mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa proses likuidasi Perseroan telah berakhir;
- Berdasarkan Akta No. 37 tertanggal 31 Juli 2019 dibuat di hadapan Notaris Iliawan Dekrit S.H, M.H ("Akta No. 37"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan untuk menyetujui dan menerima laporan proses likuidasi yang telah disiapkan oleh Likuidator dan hasil - hasilnya dalam melaksanakan proses likuidasi Perseroan; dan
- Berdasarkan Akta No. 37, para pemegang saham Perseroan juga telah memutuskan untuk memberikan pelepasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada Likuidator, untuk segala tindakan korporasi yang telah ia lakukan atau sebabkan selama proses likuidasi.

Jakarta, 7 Agustus 2019

Likuidator **PT. Tellabs Indonesia (Dalam Likuidasi)**

Keterangan		Semula :	Menjadi :
Dewan Komisaris	M. Noor Rachman		M. Noor Rachman
	Badrul Hisyam Bin Abu Bakar		Badrul Hisyam Bin Abu Bakar
	Sharifah Sarah Syed Mohamed Tahir		Mohamad Yasin Bin Abdullah
Keterangan		Semula :	Menjadi :
Komite Investasi	Badrul Hisyam Bin Abu Bakar		Badrul Hisyam Bin Abu Bakar
	Denny R. Thaher		Ahmad Najih Nazian

Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Jakarta, 07 Agustus 2019
Manajer Investasi
PT MAYBANK ASSET MANAGEMENT



PT TRIWIRA INSANLESTARI Tbk.

("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi PT Triwira Insanlestari Tbk. ("Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yang selanjutnya disebut sebagai ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Agustus 2019
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Jl. Guntur 45 - Jakarta Selatan.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

- Pengesahan rencana kerja management 2019.
- Persetujuan pengambil alih Perusahaan (Business Unit) lain.
- Penambahan bidang usaha Perseroan.
- Perubahan susunan pengurus Perseroan

Ketentuan Umum:

- Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat kabar Neraca tanggal 23 Juli 2019.
- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini merupakan undangan.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam rapat tersebut adalah:
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan kedalam penitipan kolektif, adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, pukul 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal Selasa, tanggal 6 Agustus 2019.
- a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan: para anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat. Namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam penghitungan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di PT Admitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading - Jakarta Utara
c. Semua surat kuasa asli untuk Rapat ini harus sudah diterima oleh Corporate Secretary Perseroan di alamat yang dicantumkan pada butir 4b di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk/Passport yang masih berlaku.
Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan salinan anggaran dasar dan perubahannya serta akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
- Bahan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham telah tersedia di Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Rapat dan tersedia di tempat diselenggarakan Rapat pada tanggal Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi terbitnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat di mulai.

Jakarta, 7 Agustus 2019
PT Triwira Insanlestari Tbk.
Direksi Perseroan